



PERANAN *SUSTAINABLE FINANCE* PADA INDUSTRI UMKM INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Riyan Harbi Valdiansyah^{*1)}; Dian Widiyati²⁾

¹⁾ *rvaldiansyah@budiluhur.ac.id, Universitas Budi Luhur*

²⁾ *dosen02421@unpam.ac.id, Universitas Pamulang*

*penulis korespondensi

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) and can have a significant environmental impact. They have the potential to innovate in terms of environmental science and make relevant contributions to technology and environmental improvement. This literature review aims to explore the role of MSMEs in promoting sustainable development and environmental conservation. This study employs descriptive analysis to systematically present collected data. The research findings assert that the primary obstacle to sustainable finance implementation is the need to persuade businesses and society that prioritizing nature and considering sociological effects will lead to more profitable and sustainable outcomes. To shift the mindset of economic actors from short-term profits to long-term welfare, we need innovative ideas. The challenges of green microfinance development in Indonesia can be attributed to external and internal credit constraints. By transitioning from conventional financing to sustainable financing, SMEs can reap long-term benefits. Understanding this concept will enable economic actors to participate in the significant shift towards a sustainable and inclusive economy. Stakeholders must collaborate to assist SMEs in facing the challenges of adopting sustainable finance. Promoting sustainable access to financing for SMEs requires a holistic approach from the government, financial institutions, and private sector.

Keywords: *Economy, MSMEs, Sustainability, Sustainable Finance*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan secara keseluruhan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terkait dengan praktik produksi konvensional yang lebih mengedepankan sumber daya alam secara mendalam. UMKM juga memiliki potensi untuk berinovasi dari sisi lingkungan dan memberikan kontribusi yang relevan terhadap teknologi dan perbaikan lingkungan. Desain penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara teratur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan adalah meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa upaya untuk menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan berkelanjutan jika dilakukan dengan mempertimbangkan potensi alam dan efek sosiologi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan gagasan untuk mengubah cara berpikir pelaku ekonomi dari fokus pada keuntungan jangka pendek menjadi fokus pada kesejahteraan jangka panjang. Tantangan pengembangan keuangan mikro hijau di Indonesia dapat dijelaskan sebagai pembatasan kredit eksternal dan pembatasan kredit internal. Peralihan dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM. Selain peluang untuk mengembangkan usaha, pengenalan konsep ini juga akan memungkinkan para pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam perubahan besar menuju perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Para pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu bekerja sama untuk membantu UMKM menghadapi tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi keuangan berkelanjutan. Diperlukan pendekatan holistik dari pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk menumbuhkan akses UMKM terhadap pembiayaan berkelanjutan.

Kata Kunci: Berkelanjutan, Ekonomi, Keuangan Berkelanjutan, UMKM

PENDAHULUAN

Saat ini, isu keuangan berkelanjutan sedang menjadi perhatian utama di semua sektor bisnis, termasuk industri pertambangan, keuangan, dan UMKM. Keuangan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai salah satu instrumen keuangan yang bertujuan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya dengan mengatur emisi dan mendorong pengembangan energi terbarukan serta pembangunan berkelanjutan yang mencakup tanggung jawab lingkungan, sosial dan tata kelola. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya bersama untuk membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkelanjutan bagi manusia dan bumi, dengan tiga elemen inti yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan (Mahesh et al., 2022).



Isu keuangan berkelanjutan pada industri UMKM di Indonesia menjadi sorotan karena kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian dan keberlanjutan negara. Pada tahun 2022, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia melampaui 65 juta dan terus bertambah hingga saat ini. Secara pendapatan nasional, sektor UMKM juga menyumbangkan sebesar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menampung 97 persen dari total tenaga kerja (Falah *et al.*, 2023). Oleh karena itu, ekspansi UMKM menjadi hal esensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. UMKM juga memainkan peran utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 1 mengakhiri kemiskinan, SDG 2 mengakhiri kelaparan, SDG 3 kesehatan dan kesejahteraan yang baik, SDG 5 kesetaraan gender, SDG 8 mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan SDG 9 meningkatkan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi (Tonis (Bucea-Manea), 2015).

Terlebih lagi, UMKM dalam skala global dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, terkait dengan praktik produksi konvensional yang cenderung menggunakan sumber daya alam secara intensif. Namun, di sisi lain, UMKM juga memiliki potensi untuk berinovasi dari sisi lingkungan dan memberikan kontribusi yang relevan terhadap teknologi dan perbaikan lingkungan. (Ayuka & Priatna, 2023).

Tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia lainnya, isu keuangan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam industri UMKM. Sebagai contoh, *United Nation Development Program* (UNDP), melalui *Global Legal Entity Identifier Foundation* (GLEIF) dan Otoritas Moneter Singapura, telah menandatangani kesepakatan untuk mengadopsi kredensial digital ESG untuk UMKM di seluruh dunia. Kesepakatan ini merupakan peluncuran inisiatif baru yang diberi nama '*Project Savannah*', yang bertujuan untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan seperangkat *Universal Trusted Credentials* (UTC) yang diakui secara global. Dengan memiliki kredensial ini, UMKM akan memiliki akses yang lebih cepat terhadap pembiayaan dan peluang pasar baru, yang dimungkinkan oleh data yang transparan dan dapat dipercaya (UNDP, 2023).

Mengingat pentingnya hal ini, penelitian ini memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya peran keuangan berkelanjutan bagi industri UMKM, baik dari segi tantangan maupun peluang yang dapat menjadi acuan untuk penerapan dalam kegiatan bisnis UMKM di masa depan. Hal ini penting dilakukan karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya, banyak lembaga finansial yang telah membahas mengenai keuangan berkelanjutan dalam hal keputusan investasinya dalam penerapan prinsip ekonomi, social dan tat kelola untuk memberikan pembiayaan, namun di sisi lain, UMKM seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai (Durst & Gerstlberger, 2021). Sementara itu, literatur mengenai keuangan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi UMKM dalam meningkatkan kinerja berkelanjutan dan menjadi inovator yang peduli terhadap lingkungan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori stakeholder

Freeman, Dmytriyev & Phillips (2021) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai berbagai kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Namun, setiap pemangku kepentingan mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap perusahaan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan harapan para pemangku kepentingan yang berbeda, karena setiap pemangku kepentingan mempengaruhi ketersediaan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan perlu menjalin komunikasi terbuka dan meningkatkan interaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemangku kepentingannya.



Konsep Keberlanjutan (Sustainability Concept)

Pada tingkat makro, para ahli telah menggambarkan konsep keberlanjutan dalam berbagai cara, termasuk berbagai cara, termasuk keberlanjutan yang kuat (Ott, 2011) dan model ekonomi negara yang stabil (Daly, 1991). Dengan berbagai variasi tersebut, keberlanjutan biasanya digambarkan sepanjang garis dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial (Purvis *et al.*, 2019). Pada tingkat mikro, tingkat organisasi, keberlanjutan didefinisikan dalam penelitian ini sebagai yang mempertimbangkan dimensi ekologi, sosial dan ekonomi, mengakui bahwa semua harus dipertimbangkan bersama untuk menemukan kemakmuran yang berkelanjutan. Dalam literatur perusahaan berkelanjutan Dalam literatur perusahaan berkelanjutan, keberlanjutan sering kali merujuk pada kesejahteraan berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan generasi mendatang (Kantabutra, 2022; Avery & Bergsteiner, 2020; Avery, 2005).

Kuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance)

Kuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di Indonesia merujuk pada dukungan yang komprehensif dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, yang mencakup keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam upaya untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 pada tanggal 5 Desember 2014. Panduan ini berisi rencana kerja program keuangan berkelanjutan yang akan diterapkan oleh industri jasa finansial yang berada di bawah pengawasan OJK, termasuk industri perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Tujuan dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan

Tujuan program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk: (1) Meningkatkan ketahanan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Ketahanan terkait dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik, sedangkan daya saing terkait dengan kemampuan LJK untuk melakukan inovasi produk/layanan yang ramah lingkungan. (2) Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. (3) Berkontribusi pada komitmen nasional dalam menghadapi permasalahan pemanasan global melalui kegiatan bisnis yang berfokus pada pencegahan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia meliputi: (1) Prinsip Pengelolaan Risiko yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko LJK, dengan tujuan menghindari, mencegah, dan meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan manfaat dari kegiatan pendanaan dan operasional LJK. (2) Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan yang inklusif, dengan meningkatkan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu, juga menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal. (3) Prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sosial dan Pelaporan dengan menjalankan praktik tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang kuat dan transparan dalam operasional LJK dan terhadap praktik tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang dilakukan oleh nasabah LJK; serta secara rutin menginformasikan peningkatan LJK dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada umum. (4) Prinsip Peningkatan Kapabilitas dan Kerjasama Kemitraan dengan mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia,



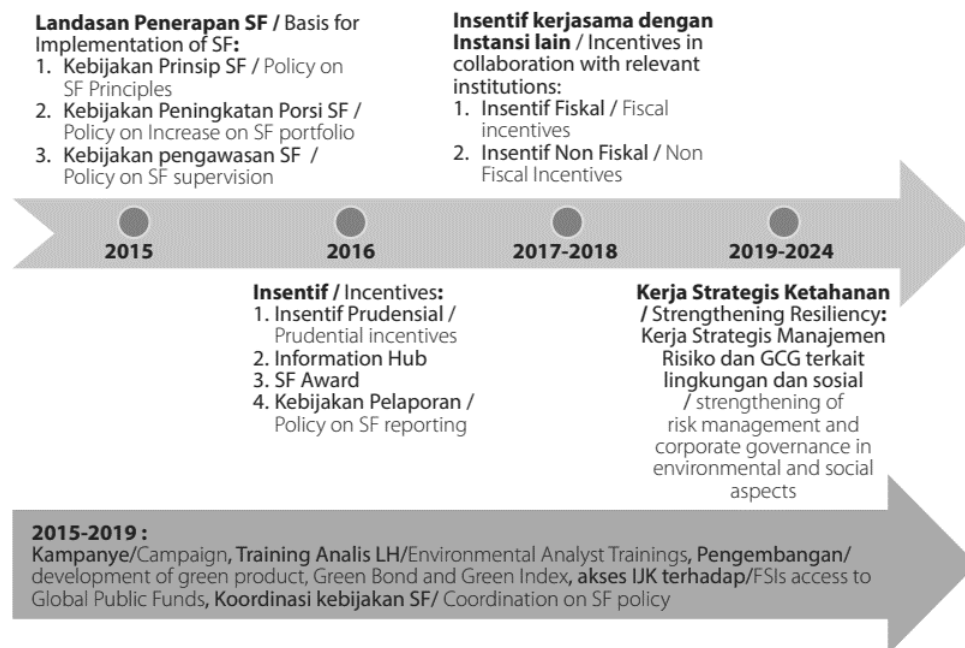
kemajuan teknologi informasi, dan proses operasional dari setiap LJK yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antara pembuat regulasi, pihak pemerintah, lembaga jasa keuangan dan pemanfaatan kerjasama dengan lembaga domestik dan internasional untuk mendorong peningkatan isu keuangan berkelanjutan. Definisi dan prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia ini dapat direvisi berdasarkan masukan dari berbagai pihak, terutama dari Kementerian terkait dan industri finansial (bank dan non-bank) yang diatur dalam kebijakan atau regulasi OJK.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Kuangan berkelanjutan adalah dukungan komprehensif dari sektor jasa keuangan dalam hal penciptaan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan relevansi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tantangan utama dalam penerapan keuangan berkelanjutan adalah memastikan para pelaku usaha dan pihak umum bahwa cara untuk mencapai keuntungan dapat dilakukan dengan memperhitungkan potensi alam dan dampak sosial terhadap masyarakat. Prinsip 3P (*profit, people, planet*) menjadi landasan dalam hal ini. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk mengubah pola pikir pelaku usaha dari fokus pada keuntungan dalam waktu jangka pendek menjadi keberlanjutan jangka panjang.

Untuk mempercepat implementasi keberlanjutan dalam hal lingkungan, social dan tata kelola, Masyarakat perlu mempersiapkan inisiatif yang mendukung inovasi-inovasi yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini menjadi dasar dalam menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) yang merupakan bagian integral dari rencana pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia ke depan.

Gambar 1. Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap I dan II



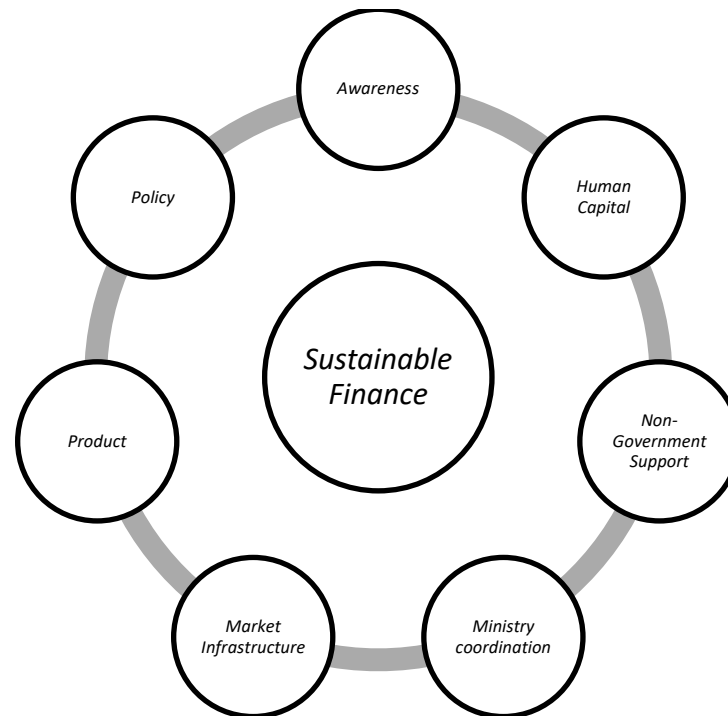
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dalam Roadmap Tahap II, inisiatif keuangan berkelanjutan akan menggabungkan tujuh komponen menjadi satu ekosistem yang utuh. Tujuh komponen keuangan berkelanjutan tersebut meliputi: (1) Kesadaran: Meningkatkan kesadaran dengan mengembangkan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan komunitas. (2) Sumber Daya Manusia: Mengembangkan kemampuan internal dan eksternal melalui program pengembangan yang komprehensif dan terstruktur. (3) Dukungan non-pemerintah: dukungan sisi permintaan dan penawaran, dukungan penelitian (profesional, lembaga penelitian, universitas) dan organisasi internasional, keanggotaan Forum Internasional



untuk Mengembangkan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan. (4) Koordinasi Kementerian atau lembaga terkait: Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga dan kelompok kepentingan lainnya. (5) Infrastruktur Pasar: Mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan. (6) Produk atau luaran: mengembangkan berbagai macam produk dan layanan keuangan berkelanjutan. (7) Pedoman atau kebijakan: mengatur pengembangan berbagai pedoman untuk mendukung keuangan berkelanjutan.

Gambar 2. Tujuh Komponen Keuangan Berkelanjutan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

METODE

Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka atau literature review yang bertujuan untuk secara kritis mengkaji pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam literatur akademis dan merumuskan kontribusinya terhadap topik-topik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menguraikan data yang telah dikumpulkan secara teratur. Selain itu, penjelasan yang jelas dan pemahaman yang baik juga diberikan agar pembaca dapat memahami dengan baik. Data dikumpulkan melalui artikel ilmiah dan berita yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Sustainable Finance pada UMKM Indonesia

Menurut Durst and Wolfgang (2020), Industri UMKM di Kawasan Asia memiliki beragam tantangan dalam membiayai proyek-proyek UMKM. Kawasan ini memiliki negara-negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi serta negara-negara kurang berkembang. Mengingat hal ini, keberhasilan ekonomi UMKM di kawasan ini sangat penting bagi perekonomian Asia. Perekonomian di negara-negara Asia sering kali dicirikan sebagai sistem keuangan dan pasar modal yang didominasi bank; khususnya, pasar modal ventura belum berkembang dengan baik. Bank adalah sumber pembiayaan utama dan hampir 90% negara Malaysia, 80% Tiongkok, dan 70% sistem keuangan India terdiri dari pinjaman bank



(Yoshino & Hesary, 2018). Namun, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi UKM di wilayah ini. Negara-negara yang memperkenalkan Basel III (kerangka peraturan internasional untuk bank) mungkin akan merugikan sikap bank dalam memberikan pinjaman terhadap UKM. Kerangka peraturan ini memperkuat manajemen risiko bank dengan mengadopsi peraturan baru seperti kerangka likuiditas dan kerangka rasio *leverage*. Langkah-langkah ini mungkin memaksa bank untuk memberikan pinjaman kredit jangka panjang kepada perusahaan dan membatasi opsi pembiayaan bagi UKM (Yoshino & Hesary, 2018).

Dalam hal keuangan berkelanjutan, Indonesia telah mengalami reformasi yang substansial. Pada tahun 2015, Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembangkan sektor keuangan berkelanjutan. Untuk memperkuat komitmen tersebut, pada tahun 2017, OJK mengeluarkan peraturan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan manajemen risiko investasi, sosial, dan lingkungan hidup yang bertanggung jawab, serta inklusivitas dalam operasionalnya. Dengan adanya aturan tersebut, OJK juga dapat memberikan insentif bagi efektivitas penerapan keuangan berkelanjutan. Delapan bank telah ditunjuk OJK pada Februari 2019 untuk memulai penyaluran kredit berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan. Sejauh ini, bank telah terlibat dalam proyek energi terbarukan, bangunan ramah lingkungan, serta infrastruktur dan ekowisata (Asia Securities Industry and Financial Markets Association, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi keuangan berkelanjutan adalah memastikan pelaku usaha dan pihak umum bahwa mendapatkan keuntungan dapat dilakukan dengan mengedepankan pertimbangan potensi alam dan dampak sosial untuk masyarakat luas. Prinsip 3P (*profit, people, planet*) menjadi landasan penting dalam hal ini. Oleh karena itu, diperlukan ide cemerlang yang dapat mengubah *mindset* para pelaku usaha agar fokus pada kemakmuran jangka panjang daripada hanya mendapatkan keuntungan jangka pendek (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Menurut Badan Kebijakan Fiskal Indonesia (2023) dalam rangka meningkatkan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau UMKM dalam meningkatkan inklusifitas keuangan, tantangan pengembangan keuangan mikro hijau di Indonesia dari studi literatur, dapat dirangkum sebagai *external credit rationing* dan *internal credit rationing*. Dimana *External Credit Rationing* adalah sebagai berikut: (1) Terbatasnya akses terhadap informasi keuangan mikro hijau; (2) Ketidakpastian teknologi, pasar, dan peraturan yang ketat; (3) Kurangnya identifikasi terhadap risiko sosial dan lingkungan serta kurangnya kapasitas pada institusi keuangan; (4) Kurangnya insentif dari pemerintah terhadap proyek ramah lingkungan; (5) Ketidaksesuaian tempo pembiayaan karena proyek ramah lingkungan memakan waktu yang cukup panjang sementara fasilitasi pembiayaan diberikan dalam jangka waktu yang lebih pendek; (6) Terbatasnya usaha atau proyek yang ramah lingkungan sehingga realisasi pembiayaan tidak maksimal; (7) Kurangnya kapasitas sektor perbankan dalam mendukung usaha atau bisnis yang ramah lingkungan karena isu ramah lingkungan dan ekonomi hijau belum populer di kalangan masyarakat; (8) Masih dalam tahap pengembangan, sehingga ekosistem green finance seperti regulasi, kerangka kerja, dan standarisasi untuk produk green belum siap.

Sedangkan tantangan internal (*internal credit rationing*) yang dihadapi UMKM berdasarkan yang paling tinggi antara lain: (1) Tingginya suku bunga; (2) Proses peminjaman dan birokrasi yang membutuhkan waktu yang panjang; (3) Keterbatasan jaminan yang tersedia; (4) Jangka waktu pengembalian pinjaman yang singkat; (5) Tidak memenuhi persyaratan slik Otoritas Jasa Keuangan; (6) Tidak tersedianya produk pembiayaan yang sesuai (misalnya tidak ada pembiayaan syariah); (7) Persyaratan tabungan di muka.



Peluang Sustainable Finance pada UMKM Indonesia

Inovasi dalam keuangan berkelanjutan tidak hanya membuka peluang untuk ekspansi usaha yang bertanggung jawab, namun dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk ikut dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Penerapan keuangan berkelanjutan bagi UMKM dalam pembuatan keputusan investasi yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola. Keuangan berkelanjutan dapat berupa pembiayaan dengan suku bunga untuk pendanaan proyek-proyek yang berkonsentrasi pada isu berkelanjutan. Hal ini memberikan keuntungan keuangan bagi UMKM, memudahkan usaha dalam pengembangan produk dan jasa yang berfokus pada isu keberlanjutan, sesuai dengan pilihan dan preferensi konsumen yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Adanya peluang jangka panjang yang positif dalam bisnis UMKM yang berkelanjutan, penting bagi pelaku usaha untuk mulai menerapkan keuangan berkelanjutan. Selain itu, penerapan keuangan berkelanjutan oleh UMKM dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

UMKM yang memiliki tujuan praktik usaha berkelanjutan pada penerapan keuangan berkelanjutan juga mengedepankan dalam mendapatkan investor yang peduli dengan masalah keberlanjutan. Permintaan pasar saat ini juga semakin mengarah pada produk dan jasa yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, berinvestasi dalam keuangan berkelanjutan dapat membantu UMKM mendapatkan lebih banyak investor dan pelanggan (Fatoki, 2021).

Selain itu, meskipun transisi dari kegiatan ekonomi tradisional ke UKM ramah lingkungan merupakan sebuah tantangan besar, penerapan ekonomi ramah lingkungan mempunyai potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis yang besar. Menurut data Forum Ekonomi Dunia tahun 2020, transisi menuju ekonomi hijau dapat menciptakan peluang bisnis senilai \$10,1 triliun dan 395 juta lapangan kerja pada tahun 2030. Selain itu, akses terhadap modal finansial juga meningkat seiring dengan meningkatnya minat investor untuk berinvestasi pada ekonomi ramah lingkungan. Hal ini sangat bermanfaat, apalagi sektor UMKM memerlukan pembiayaan, baik melalui pinjaman maupun investasi, untuk menjaga kelangsungan usahanya.

Peralihan dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM. Selain peluang untuk mengembangkan usaha, pengenalan konsep ini juga akan memungkinkan para pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam perubahan besar menuju perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. UMKM dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan (Nisaputra, 2023).

Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan inisiatif keuangan hijau sejak tahun 2010. Pada tahun 2012, BI juga menjadi pendiri Sustainable Banking Network dan menerbitkan Model Pemberian Pinjaman Hijau. Saat ini, BI sedang mengembangkan kerangka Kebijakan Keuangan Hijau dengan tiga pilar utama, yaitu penguatan kebijakan makroprudensial hijau, pengembangan pasar keuangan hijau dan pasar karbon, serta pengembangan UMKM hijau untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu contoh implementasi dari pilar makroprudensial hijau adalah pengaturan rasio pinjaman/ pembiayaan terhadap nilai properti untuk KPR hijau dan uang muka pemberian kredit/ pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan untuk KKB hijau.

Dalam mengklasifikasikan UMKM hijau, BI telah mengembangkan dan memodifikasi kajian Koirala (2019) dengan tiga model. Pertama, ada *eco-adopter*, yaitu UMKM yang hanya mengadopsi praktik ramah lingkungan. Keberlanjutan bukanlah bagian inti dari model bisnis, namun sudah mengadopsi praktik ramah lingkungan dan dapat menangkap peluang di pasar hijau. Kedua, ada *eco-entrepreneur*, yaitu UMKM yang sudah mengadopsi praktik ramah lingkungan dan menjadikan keberlanjutan sebagai bagian inti dari model bisnis, serta dapat menangkap peluang di pasar hijau. Ketiga, ada *eco-innovator*, yaitu UMKM yang telah



melakukan inovasi ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi, proses produksi, pemasaran, organisasi, praktik bisnis, dan hubungan eksternal dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan.

Inisiatif Pelaku Usaha UMKM dalam membangun konsep Sustainable Finance

Setelah mengetahui tantangan dan peluang UMKM dalam menghadapi isu keuangan berkelanjutan, para pelaku UMKM sebaiknya mengambil langkah-langkah inisiatif untuk mengembangkan ekosistem yang transparan, membangun sinergi kerja sama dengan Kementerian, Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait, serta meningkatkan kapabilitas industri keuangan sesuai dengan roadmap II Keuangan Berkelanjutan (2021-2025) yang telah diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang terlihat dalam gambar 1. Para pelaku usaha diharapkan menyediakan platform untuk mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung keuangan berkelanjutan. Para pelaku usaha juga harus memiliki inovasi dalam mengembangkan jenis produk dan layanan usaha yang berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari produksi usaha. Selain itu, para pelaku usaha perlu mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi perusahaan yang mendukung kegiatan keuangan berkelanjutan. Para pelaku UMKM juga perlu memperluas jaringan kerja sama dengan Kementerian, Lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pertukaran informasi dengan UMKM. Di sisi lain, dukungan dari Lembaga terkait juga penting dalam bentuk permintaan dan penawaran, atau dalam konteks ekonomi disebut sebagai supply and demand. Pelaku usaha dapat memperoleh dukungan melalui riset dari lembaga riset, universitas, dan tenaga ahli. Dukungan dari lembaga internasional juga sangat diperlukan untuk mengembangkan inisiatif keuangan berkelanjutan. UMKM dapat melakukan pengembangan internal dan eksternal melalui program capacity building yang terstruktur dan massif. Terakhir, para pelaku UMKM perlu menyadari dan memberikan perhatian terhadap keuangan berkelanjutan.

PENUTUP

Proses transisi UMKM menuju *sustainable finance* membuka banyak peluang bisnis baru serta tantangan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, peralihan ini harus dilakukan secara tertata sehingga peluang-peluang yang ada dapat langsung dirasakan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Para *stakeholder* yang terkait juga perlu untuk bersinergi dalam rangka membantu UMKM menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM sehubungan dengan munculnya *sustainable finance*. Perlunya pendekatan holistik dari pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan berkelanjutan. Edukasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya kegiatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pengembangan produk keuangan yang sesuai berupa inovasi produk yang bersifat berkelanjutan dalam rangka mempercepat UMKM yang bersifat kehijauan, serta penyediaan infrastruktur dan dukungan kelembagaan yang memadai dapat membantu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, UMKM dapat berperan lebih aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asia Securities Industry and Financial Markets Association. (2020). *Sustainable Finance in Asia Pacific: Regulatory State of Play*. <https://www.asifma.org/wp-content/uploads/2020/03/sustainable-finance-in-asia-pacific.pdf>
- Avery, G. (2005). *Leadership for Sustainable Futures: Achieving Success in a Competitive World*. Edward Elgar



- Avery, G.C.; Bergsteiner, H. (2020). *Sufficiency Thinking: Thailand's Gift to an Unsustainable World*. Routledge
- Ayuka, I. R., & Priatna, W. B. (21 Desember 2023). Saatnya UMKM Terapkan Sustainable Finance. *Republika (on-line)*. <https://www.republika.id/posts/49057/saatnya-umkm-terapkan-sustainable-finance>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2023). Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2023/12/28/2459-kajian-peningkatan-kapasitas-pembiayaan-mikro-kepada-sektor-hijau-untuk-meningkatkan-inklusifitas-keuangan>
- Daly, H.E. (1991). *Steady-State Economics*, 2nd ed. Island Press
- Durst, S., & Gerstlberger, W. (2021). Financing Responsible Small- and Medium-Sized Enterprises: An International Overview of Policies and Support Programmes. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm14010010>
- Falah, M., Fitri, A., & Elviani, L. (2023). Pengaruh Literasi keuangan dan Pengelolaan Keuangan UMKM: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(6), 2233–2239.
- Fatoki, O. (2021). Sustainable leadership and sustainable performance of hospitality firms in South Africa. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(4), 610–621. [https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4\(37\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(37))
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder Theory and the Resource-Based View of the Firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.1177/0149206321993576>
- Kantabutra, S. (2022). Toward a System Theory of Corporate Sustainability: An Interim Struggle. *Sustainability*, 14, 15931. <https://doi.org/10.3390/su142315931>
- Mahesh, K. M., Aithal, P. S., & Sharma, K. R. S. (2022). Impact of Sustainable Finance on MSMEs and other Companies to Promote Green Growth and Sustainable Development. *International Journal of Applied Engineering and Management Letters*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.47992/IJAEM.L.2581.7000.0120>
- Nisaputra, R. (30 Mei 2023). Peran Perbankan Mendukung UMKM Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan. *Infobank (on-line)*. <https://infobanknews.com/peran-perbankan-mendukung-umkm-hijau-dan-ekonomi-berkelanjutan/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025). [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021%20-%202025).pdf)
- Ott, K. (2011). On Substantiating the Conception of Strong Sustainability. In Parodi, O., Ayestaran, I., & Banse, G. (Eds.), *Sustainable Development: Relationships to Culture, Knowledge and Ethics*. KIT Scientific Publishing
- Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: In search of conceptual origins. *Sustain. Sci.* 14, 681–695. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>
- Tonis (Bucea-Manea), R. (2015). SMEs Role in Achieving Sustainable Development. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.26458/jedep.v4i1.102>
- UNDP. (2023). MSMEs to unlock new access to sustainable finance. <https://www.undp.org/news/msmes-unlock-new-access-sustainable-finance>
- Yoshino, N., & Hesary, F. T. (2018). The Roles of SMEs in Asia and Their Difficulty in Assessing Finance. *ADB Working Paper*, 1(911), 1–52. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/474576/adb-wp911.pdf>